

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi tidak akan terlepas dari yang namanya pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak dapat terencana dengan baik, tentunya akan mengakibatkan adanya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, melalui pembangunan di bidang ekonomi ini dapat mendukung tujuan agar menciptakan perubahan didalam bidang kehidupan lainnya. Didalam pembangunan nasional ada beberapa aspek yang paling penting dimana akan membuat tujuan akhir untuk menambah kesejahteraan masyarakat, yakni pembangunan ekonomi. Tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Singkatnya, hakekat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi (Jhingan, 1992).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pada pembangunan ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah jauh lebih spesifik (Tambunan,2001).

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh factor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan (Rahajeng, 2014: 92).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad,2010).

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008).

Otonomi daerah adalah bukti pemerintah daerah benar benar serius didalam membangun suatu daerah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang artinya Pemerintah Daerah yang selanjutnya direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 isinya yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 dan direvisi lagi menjadi UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena diterapkannya otonomi suatu daerah pemerintah daerah bisa maksimal dalam mengelola sumber daya alam daerahnya sendiri yang bertujuan mendirikan daerahnya, namun melalui konsekuensi pemerintah daerah serta perangkatnya yang harus bekerja keras supaya dapat menggapai sesuatu yang telah menjadikan tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Kuncoro, 2004).

Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak dibagian tengah Pulau Jawa. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa termasuk bagian dari provinsi Jawa Tengah. Jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan gromosol, sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik. Kondisi ini membuat pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah.

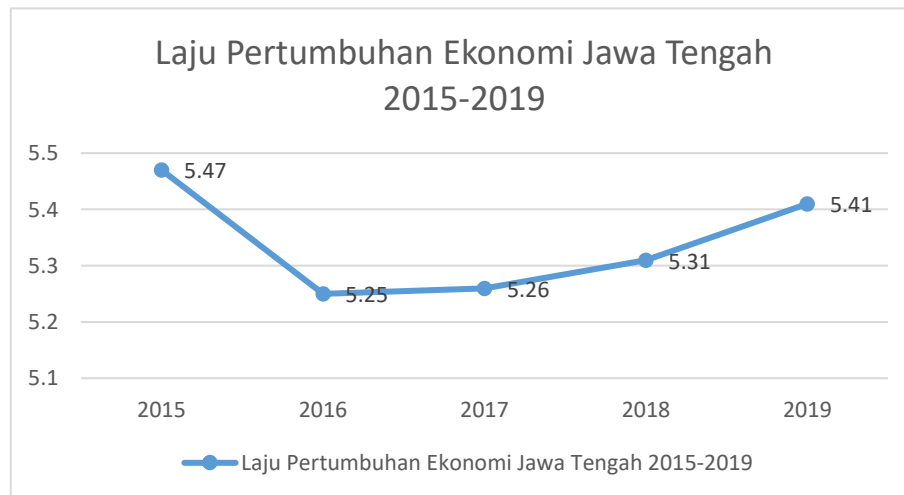
Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Didalam al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bias ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas (fakir) seperti yang diisyaratkan dalam QS 63: 9-10. Selain ayat tersebut, al-Qur'an juga mengungkapkan terhadap kinerja nabi Ibrahim as dalam membangun Ka'bah dan regulasi yang telah membumi dan kemudian dilanjutkan oleh nabi Muhammad saw. Sejak abad 14 silam, efek regulasi Mekah (Ka'bah) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh Negara yang memiliki akses ekonomi bidang teknologi, transportasi termasuk kinerja

perbankan dan pelayanan jasa non perbankan lainnya yang turut andil pada posisi penawaran yang tinggi.

Dalam Islam, kemiskinan seringkali diakui nasib yang menimpa, namun tidak berarti membenarkan dan membiarkan diri untuk hidup miskin. Tidak jarang, akibat kemiskinan manusia terjerat dengan berbagai perbuatan dan berakhir dengan kekufuran, dan hal itu sudah diingatkan oleh nabi Muhammad Saw.

Wonosobo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Ibukotanya adalah Wonosobo. Kabupaten Wonosobo yaitu daerah pegunungan yang ketinggiannya antara 250m sampai 2.250m di atas permukaan laut dan termasuk jenis pegunungan dengan lembah yang curam. Kemudian secara geografis Kabupaten ini mempunyai luas 98.448 ha (984,68 Km²) terletak di bebaturan prakwaker. Keadaan seperti ini menyebabkan timbulnya bencana alam terutama pada saat musim penghujan contohnya tanah longsor (land slide), gerakan tanah runtuh dan gerakan merayap. Kondisi pada Wonosobo ini yang subur sangat mendukung untuk pengembangan dalam hal pertanian sebagai mata pencarian para masyarakat Wonosobo.

Dalam sektor pertanian tersebut mempunyai komoditas yaitu padi, teh, kopi, tembakau dan macam jenis sayuran dan tanaman hortikultura lainnya. Wonosobo yang mempunyai suhu udara 14,3 - 26,5 °C cocok untuk budidaya jamur, carica, pepaya, asparagus dan jenis kayu sebagai komo diti ekspor non migas serta ada beberapa jenis tanaman khas Wonosobo seperti Purwaceng, Gondorukem dan Kayu putih.

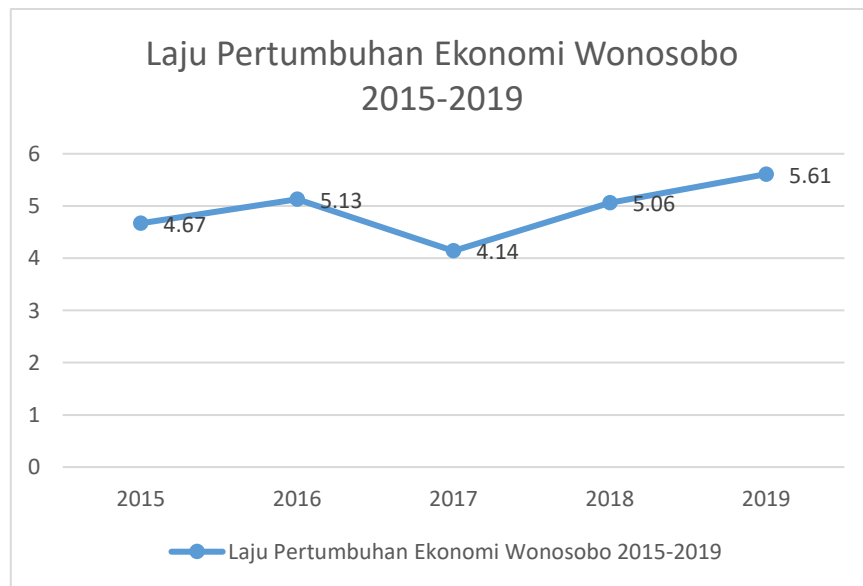


Sumber : BPS Jateng

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (2015-2019)

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015-2019 berfluktuatif namun kembali meningkat pada tahun 2015 kemudian menurun ditahun 2016. Kemudian di tahun 2017 tercatat sebesar 5,26 persen. Lalu di tahun 2018 meningkat sebesar 5,31 dan di tahun 2019 menjadi 5,41 persen.

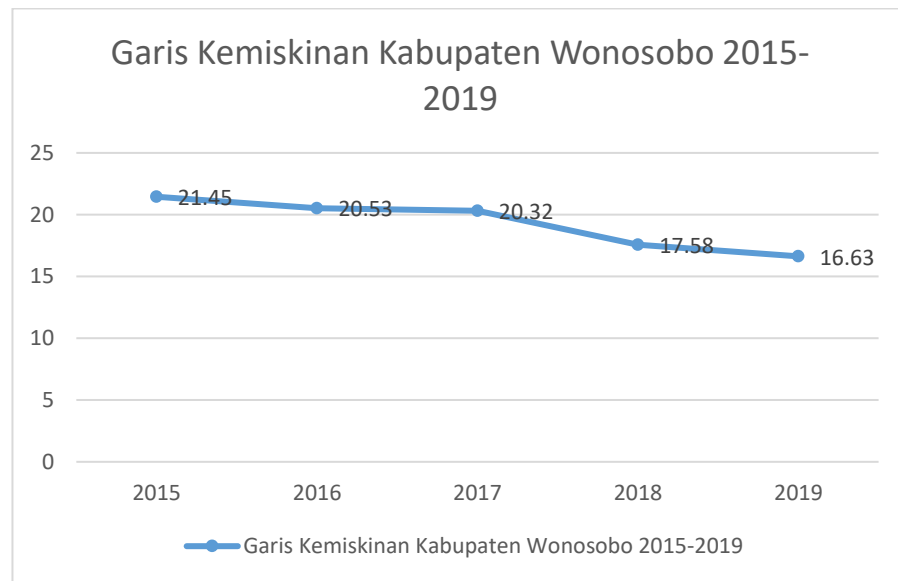
Kabupaten Wonosobo adalah Kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Wonosobo mempunyai luas w98.448 ha (984,68 km²) dan di bebaturan prakwaker. Situasi ini, dapat mengakibatkan timbulnya bencana alam terutama pada saat penghujan contohnya tanah longsor (land slide), tanah runtuh dan gerakan merayap. Kondisi di Kabupaten Wonosobo yang sangat subur dapat mendukung untuk pengembangan pertanian sebagai mata pencarian utama masyarakat Wonosobo.



Sumber : BPS Wonosobo

Gambar 1. 2 Grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo 2008-2017

Dari gambar 1.2 jika di perhatikan selama periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan Kabupaten Wonosobo sebesar 4,67 persen. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan 5,06 persen dan di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,61 persen.



Sumber : BPS Wonosobo

Gambar 1. 3 Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo 2015-2019

Dari gambar 1.3 diatas dapat diperhatikan selama 2015-2019 garis kemiskinan pada Kabupaten Wonosobo ini menurun disetiap tahun nya. Pada tahun 2015 memiliki Po 21,45 persen, Po disini adalah Presentase Penduduk Miskin (Po). Kemudian pada tahun 2016 memiliki angka 20,53 persen kemudian di tahun 2017 memiliki angka 20,32 persen. Lalu pada tahun 2018 mempunyai angka menurun sebesar 17,58 persen dan di tahun 2019 kembali menurun menjadi 16,63 persen. Untuk itu dapat diketahui sektor yang dapat menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo agar Wonosobo ini tidak menempati urutan termiskin di Jawa Tengah.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi yang cukup untuk lebih di kembangkan dengan sektor-sektor unggulan yang menunjang. Kabupaten Wonosobo memiliki tempat wisata yang cukup banyak. Namun Kabupaten Wonosobo ini menempati peringkat pertama

Kabupaten dengan presentase penduduk miskin tertinggi yang ada di Jawa tengah sebesar 22,02%. Melihat kondisi diatas, maka sangat menarik jika diteliti lebih jauh tentang kontribusi sektoral yang terjadi agar dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Kabupaten Wonosobo memiliki potensi ekonomi, sangat disayangkan jika strategi untuk meningkatkan kesejahteraan belum tepat dalam pengoptimalan nya. Karna masih banyak sekali lahan pertanian yang dapat dijadikan untuk menunjang kabupaten Wonosobo tersebut. Menurut dari latar belakang di atas, menarik untuk dilakukannya penelitian tentang **“Analisis Sektor Unggulan Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Di kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2019”**.

B. Batasan Masalah

Pembangunan ekonomi daerah memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Untuk itu peneliti ini membatasi permasalahan di sektor-sektor ekonomi potensial yang akan mampu mendukung pembangunan pertumbuhan di daerah Kabupaten Wonosobo melalui pendekatan Produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan data pada tahun 2015 hingga tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, permasalahan an yang bisa diteliti, yakni:

1. Sektor mana kah yang mempunyai sektor yang berpotensi unggulan pada Kabupaten Wonosobo?
2. Sektor apakah yang dapat menjadi basis yang dapat di kembangkan dalam menunjang ekonomi di kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan sektor non unggulan untuk pembangunan di suatu wilayah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian tersebut yaitu agar melihat beberapa hal diantaranya yakni:

1. Untuk mengetahui sektor apa yang menjadi potensi sebagai sektor basis untuk penunjang ekonomi di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk dapat mengetahui sektor apa yang termasuk sektor ekonomi unggulan
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana strategi pembangunan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan menggunakan analisis SWOT.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian tersebut adalah:

1. Bagi Penulis

Hasil dalam penelitian tersebut di harapkan bias menambah pengetahuan tentang hal yang diteliti menjadi suatu sarana penerapan dan implementasi teori-teori yang dapat di terima disaat kuliah di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitaian itu diharapkan bisa di gunakan untuk informasi tentang kondisi ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dalam penelitian diharapkan bias meyalurkan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terutama didalam bidang ekonomi.

